

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta.
- Basah, Sjachran. 1992, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindakan Administrasi Negara, Alumni, Bandung.
- Basah, Sjachran. 1995, Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, FH UNAIR, Surabaya.
- Djoko Prakoso. Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta
- Erwin, Johan Isharyanto dan Sarnawa, Bagus. 2010, Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik, Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
- Harun, 2009, Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Hendriyansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi dan Implementasi, Gava Media, Yogyakarta.
- Hendry S, Siswosoedirjo. 2008, Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen, Visimedia, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi & Perkerjaan, Pustaka Yustita, Yogyakarta.
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian Suatu Studi Historis Komperatif, PTIK, Jakarta
- Ridwan, Juniarso. Sudrajat, Ahmad Sodik, Hukum Admnistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan publik, Nuansa, Bandung.
- Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Liberty, Yogyakarta.

Sinabela, Lijan Poltak ea.all, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Soehino, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta.

Soekamto, Soerjono. 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo, Jakarta.

Sutedi, Adrian. 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafrudin, Ateng. 2012, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan. Bina Cipta. Bandung.

Widjaja, A.W. 1999, Etika Administrasi Negara, Bumi Aksara, Cetakan Kedua Jakarta.

B. Jurnal

Christina Aleida Tolan “ Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado)”, *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*, Vol. 6 No. 1. Juni 2017, hlm. 5

Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.

Ida Bagus Kade Danendra, “Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia”, *Jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat)*, Vol. 1 No.4, Oktober-Desesember 2012, hlm. 41

Ivan Fauzi Raharja, “Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif*, Vol 7 No 2, Mei 2014, hlm 5.

M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018, hlm 115.

Nurwigati, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 17 No 1, Juni 2010, hlm 5.

Putri Diati Yanuarsasi, “Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Brawijaya*, Vol. 2, No 1, Februari 2014, hlm. 182

Tedi Sudrajat, “Perwujudan Good Governence Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Admnistrasi Negara” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2, Mei 2009, hlm 118.

Y. Sri Pudyatmoko, “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 No 4, Oktober 2007, hlm 4.

Yogi, S. Dan Ikhsan, M., “Standar Pelayanan Publik di Daerah”, *Jurnal Online*, Vol. 1 No.1, Maret 2010, hlm 4.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Petunjuk Lapangan No. Pol : JUKLAP/02/XXI/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.